



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Posisi pekerja perempuan terus mengalami peningkatan, di Indonesia sendiri melalui data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berita resmi statistik pada february 2018, jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) di Indonesia berjumlah sekitar 55,44 persen, yang naik sekitar 0,40 persen poin dibandingkan dengan tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2018, p. 2). Keterlibatan perempuan dalam partisipasi kerja juga dirasakan di sektor media. Tidak sedikit perempuan yang terjun menjaenyediaan jaminan sosial dan kesehatan sejalan dengan resiko pekerjaan jurnalis, dimana jurnalis membutuhkan mekanisme perlindungan secara luas, bukan hanya perlindungan fisik dengan asuransi namun juga perlindungan untuk tidak mengalami tekanan eksternal dan internal saat melakukan tugas jurnalistik. di jurnalis. Di Indonesia, perempuan baru bisa dengan leluasa menikmati pekerjaan di media sekitar kurang lebih 50 tahun belakangan ini, sebelumnya media massa merupakan tempat yang bisa dibilang, didominasi oleh kaum laki-laki (Arivia, 2003, p. 4)

Jauh sebelum Indonesia, keterlibatan perempuan di dalam pers Amerika sudah lebih dulu maju, kegigihannya sebagai jurnalis membawa nama Nellie Bly menjadi jurnalis perempuan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Nellie menjadi perempuan pertama yang ditugaskan untuk meliput perang Dunia ke-I dari Eropa Timur dengan menjadi koresponden di surat kabar *The New York Evening Journal*

(Kumparan, 2019). Pergeseran nilai tersebut bisa didasari karena perempuan saat ini telah menempuh pendidikan yang tinggi dan diimbangi dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dirasa dapat membantu perempuan dalam bekerja di media massa (Yuniati, 2012, p. 979). Majunya perempuan Indonesia pada tahun 50 hingga 60-an memunculkan banyak sekali peningkatan di dunia pendidikan dan juga profesi perempuan, namun hanya ada sedikit referensi bacaan bagi kaum perempuan. Hadirlah majalah *Femina* yang didirikan oleh Sofjan Alisjahbana (Alisyahbana, 2001, p.192, para 7) dan terus berkembang hingga muncul majalah-majalah perempuan lainnya seperti *Ideal* dari grup *Selecta* hingga kelompok Gramedia yang menerbitkan majalah *Nova* (p.194, para 1). Keterlibatan perempuan dalam kemelut pasar media massa di Indonesia juga bisa dilihat saat munculnya majalah wanita Indonesia yang terbit setelah kemerdekaan negara ini. *Doniea Wanita* merupakan majalah yang diterbitkan oleh Anid Idrus yang juga menerbitkan surat kabar *Waspada* pada 1949 di Medan (Alisyahbana, 200, p.192). Munculnya media-media yang berfokus pada isu perempuan juga membuat banyak perempuan menjadi bagian dari industri media itu sendiri. Dari riset yang dilakukan oleh Luviana pada tahun 2011 hingga 2012 di tujuh kota di Indonesia yang meliputi: Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makasar, Jayapura, Yogyakarta dan Medan, menunjukkan bahwa perbandingan jurnalis perempuan dan laki-laki di Indonesia berkisar 1:3 hingga 1:4 (Luviana, 2012, p. 14).

Jauh sebelum media milik bangsa Indonesia berkibar dan membuka banyak lapangan kerja bagi pekerja media khususnya perempuan, media di Indonesia didominasi oleh media asing bentukan para penjajah yang pernah mampir di negara

ini. *“Memoria der Nouvelles”* adalah surat kabar pertama yang terbit pada masa penjajahan Belanda di tahun 1615. Keberadaan pers Belanda resmi bubar ketika pemerintahan Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris pada 29 Februari 1812. Setelah kepergian Belanda dari Indonesia, Inggris juga turut menerbitkan surat kabar yakni *“Java Gavernens Gazzate”*, hingga akhirnya pada tahun 1961 mulai bermunculan surat kabar yang menggunakan bahasa asli daerah Indonesia seperti *Soerabajsch Advertentieblad* (1835), *Soerabajsch Nieuws en Advertentieblad* (1953) di Semarang, dan *De Nieuwsbode* (1961) di Bandung (Azhari, 2015).

Kini selepas dari kemelut penjajahan, jumlah media asing di Indonesia saat ini cukup banyak serta adanya ketersediaan lapangan kerja bagi jurnalis perempuan. Pemetaan kondisi jurnalis perempuan yang dirangkum dalam buku *“Jejak Jurnalis Perempuan”* oleh Luviana menunjukkan angka kesetaraan jurnalis perempuan dan laki-laki di Jakarta telah cukup seimbang, jumlah jurnalis perempuan berkisar 40,47 persen dibanding jurnalis laki-laki yang berjumlah 59,53 persen (2012, p. 35). Keberadaan media asing di Indonesia berguna untuk membagikan informasi seputar Indonesia kepada dunia luar. Mengutip dari situs berita *Kontan*, yang membahas mengenai pengalaman wartawan perusahaan media asing ketika melakukan kegiatan jurnalistiknya di Indonesia. Joe Cochrane, koresponden Indonesia untuk *International New York Times* menceritakan bahwa informasi seputar Indonesia menarik, artikel mengenai sosok Jokowi yang menarik untuk di liput media asing dapat memberi gambaran apa yang sedang terjadi di Indonesia. (Kontan.co.id, 2014). Namun kini media asing berguna untuk menmbagikan informasi seputar Indonesia kepada dunia,oresponden lainnya yakni Sam Reeves, editor berita

Agence France Presse (AFP) sepakat dengan Cochrane bahwa keramahan dan keterbukaan warga Indonesia membuat mereka betah di sini, selain itu akses untuk mendapat informasi dari para pejabat bisa dikatakan mudah dibandingkan dengan negara lain (Kontan.co.id, 2014).

Jurnalis asing yang bekerja di Indonesia baru bisa merasakan fasilitas penyediaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2017, pemberian ini beralasan karena pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak normatif yang wajib dimiliki setiap pekerja, dan merupakan amanah dari UU Nomor 24 tahun 2011 (Putsanra, 2017). Kini keterlibatan perempuan di ranah jurnalistik yang semakin meningkat mematahkan stigma bahwa jurnalistik adalah profesi yang cenderung didominasi oleh laki-laki dan disebut sebagai *Male Industry*, hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Daniel Dhakidae, bahwa *Male Industry* adalah industri yang didominasi oleh laki-laki baik dari segi kualitas (struktur organisasi dan manajemen kerja) serta kuantitas (personalia) (Wulandari, 2013, p.28). Keberadaan jurnalis perempuan di media belum tentu menjamin kesejahteraan perempuan di dalam karirnya. Angka keterlibatan perempuan dalam media tidak dapat menjamin keadaan status wanita di media (Tomar, 2011, p. 3).

Tingginya jumlah angkatan kerja perempuan di Indonesia saat ini, belum dapat sepenuhnya menjamin kesejahteraan pekerja perempuan itu sendiri. Seperti yang dikutip melalui Ntozake Shange dalam Kivel (1998) dari puisinya yang berjudul "*with no immediate cause*" mengatakan bahwa "*Every 3 minutes a woman is beaten, every five minutes a woman is raped, every ten minutes a girl is*

molested". *The Guardian* pada maret 2019 menulis artikel mengenai gerakan perempuan di Mexico, dalam artikel berita berjudul "*#MeToo reaches Mexico: majority of women in media report harassment at work*" muncul data bahwa sekitar 73 persen perempuan pekerja mendapat pelecehan seksual di tempat kerja mereka (Lakhani, 2019). Tagar *#MeTooEscritores* (*#MeTooWriters*) muncul saat para penulis perempuan berbondong-bodong menulis pengalaman buruk mereka di tempat kerja seperti pelecehan seksual, serangan fisik, penindasan secara psikologis yang terjadi baik di ruang redaksi, rumah cetak, pameran hingga di debat sastra.

Isu gender tersebut menyebar secara luas setelah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) merilis data bahwa terjadi sekiranya, sembilan pembunuhan jurnalis perempuan terjadi setiap harinya dan satu dari lima perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Sebagian dari perempuan yang disurvei menjawab bahwa mereka mendapat kekerasan dari bos mereka. Sebanyak 400 orang yang disurvei merupakan pekerja di bidang media seperti reporter dan editor, desainer, fotografer, ilustrator serta administrator. Salah seorang pendiri *Periodistas Unidas Mexicanas* (PUM) yang merupakan persatuan kolektif jurnalis Meksiko mengatakan bahwa perempuan menderita bahaya ganda di media, perempuan tidak aman untuk berada di jalan dan bahkan di tempat kerja (Lakhani, 2019) Gender dan feminisme bisa dikatakan dekat dengan pers, Renzeti dan Curran (1993) dalam Sarwono (2014, p. 49) mengatakan bahwa keberadaan laki-laki di sektor publik dan domestik merupakan bentuk patriarki. Patriarki merupakan sistem seks atau gender yang mana laki-laki lebih mendominasi perempuan dan segala hal yang dipertimbangkan laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding perempuan.

Lebih dalam, Sarwono juga menjelaskan bahwa pada awalnya perbedaan dari gender terbentuk secara alami (*nature*), namun konstruksi sosial dari hal alami tersebut mulai berkembang, direkayasa, dipaksa, hingga diberlakukan berbalik dari dasar alamiah (Sarwono, 2014). Mutali'in dalam Rokhmansyah (2016, p. 9) menjelaskan bahwa hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat konstruksi pembagian posisi atau peran yang kerap berlangsung dimasyarakat antara perempuan dan laki-laki dan bertahan hingga sekarang karena telah menjadi suatu ideologi, hal ini akhirnya berdampak bahwa perempuan hanya memiliki peran di sektor domestik yakni pengaturan rumah tangga sedangkan tugas mencari nafkah dan pemberian perlindungan dilakukan oleh laki-laki.

Ideologi tersebut akhirnya tembus hingga ke ranah komunitas. Ranah komunitas dekat urusannya dengan lingkungan kerja seorang perempuan, profesi jurnalis perempuan berada dalam suatu ranah komunitas (KomNas perempuan, 2017). Masalah kesejahteraan gender di lingkungan kerja bisa terjadi pada siapa saja, salah satunya pada mereka yang berprofesi sebagai jurnalis. Jurnalis perempuan saat ini memiliki banyak peran dan diposisikan dalam posisi yang beragam (AJI, 2012). Jaminan kesejahteraan pekerja telah banyak diatur di dalam Undang-Undang Indonesia yang salah satu yang paling mendasar adalah bahwa setiap orang dapat terjamin kesejahteraannya. Isu mengenai kesejahteraan pekerja dapat dilihat salah satunya dari bagaimana perusahaan memberikan tunjangan gaji kepada karyawannya, Salah satu alasan karyawan tidak bahagia adalah gaji yang tidak sesuai serta fasilitas yang tidak mumpuni, atau ketidakpuasan pada sistem

proses kerja yang digunakan perusahaan juga dapat memengaruhi kebahagiaan pekerjanya (Ramdania, 2014)

Tolak ukur kesejahteraan jurnalis sendiri menurut AJI dapat dilihat dari beberapa faktor pendorong, mulai dari gaji, tunjangan kesejahteraan dan fasilitas kerja (Luviana, 2012, p. 49). Kajian hukum mengenai pekerja perempuan juga tertuang dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, salah satunya adalah Keputusan menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai 07.00, perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan pemberian makanan dan minuman bergizi, penjagaan kesusilaan, dan keamanan selama di tempat kerja serta penyediaan angkutan antar jemput.

Dalam suatu pekerjaan, pekerja akan mendapat kompensasi. Ada dua macam kompensasi yang akan didapatkan oleh pekerja, yakni profit atau keuntungan yang berupa materi yang didapatkan secara langsung, dan kesejahteraan yang berupa non materi (Nurachmad, 2009). Kesejahteraan pekerja merupakan sesuatu kebutuhan yang dipenuhi atau diperlukan, dapat berupa jasmaniah ataupun rohaniah, hal tersebutpun bisa berada di luar ataupun di dalam hubungan kerja, yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas pekerja di dalam lingkungan kerjanya yang aman dan juga sehat. Kesejahteraan secara psikologis juga menjadi salah satu unsur apakah seseorang sudah sejahtera atau belum. Doyle, Hanks dan MacDonald dalam Lakoy (2009) menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis adalah gambaran dari kebahagiaan, kesehatan mental yang positif, *emotional well being*.

Ryff (1989) dalam Ghaybiyyah (2017) *Emotional well being* dapat diartikan bahwa pikiran dan perhatian berhubungan dengan perasaan depresi, ketakutan, frustrasi, harapan hidup, relaks, kebahagiaan hidup. Keadaan *psychological well-being* mencakup konsep dinamis antara dimensi subjektif, sosial dan psikologis serta perilaku yang dapat berhubungan dengan kesejahteraan. Lebih dalam, regulasi mengenai penerapan kesejahteraan pekerja perempuan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1989 tentang bagaimana tata cara mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari yakni harus menjaga keselamatan, keamanan, dan kesusilaan pekerja perempuan yakni dengan memenuhi syarat-syarat seperti, pekerja wanita tidak dalam keadaan hamil, pekerja/buruh wanita yang berumur sekurang-kurangnya, menyediakan angkutan antar jemput, memberi makanan dan minuman yang bergizi, mendapat persetujuan dari suami/ orangtua/ wali, dan memerhatikan kebiasaan setempat.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana kesejahteraan reporter perempuan baik dari media lokal maupun media asing yang ada di Indonesia. Apakah media tempat reporter perempuan bekerja sudah memerhatikan dan memahami pentingnya kesejahteraan dalam bekerja, yang berupa adanya jaminan kesehatan mental maupun psikis, serta hal-hal yang telah diatur dalam regulasi yang memiliki konsentrasi terhadap kesejahteraan perempuan di tempat mereka bekerja. Contohnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab X perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, yang berisi mengenai kesetaraan gender, kenyamanan dalam bekerja, fasilitas dan upah yang memadai, waktu istirahat, keselamatan kerja dan lain-lain.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kesejahteraan jurnalis perempuan yang ada di Indonesia?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana keadaan kesejahteraan Jurnalis perempuan di media nasional dan media asing?
2. Bagaimana pemahaman Jurnalis perempuan di media nasional dan media asing perihal isu kesejahteraan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keadaan kesejahteraan Jurnalis perempuan di media nasional dan media asing.
2. Untuk mengetahui pemahaman Jurnalis perempuan di media nasional dan media asing perihal isu kesejahteraan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini peneli mengharapkan adanya beberapa manfaat dalam aspek-aspek seperti di bawah ini:

a. Kegunaan Akademis

Peneliti berharap agar penelitian dapat memberikan kontribusi lebih berupa manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan teori terkait media

dan gender, serta bidang sosial kesejahteraan, baik itu dalam konteks materi maupun psikologis, dan juga di ranah jurnalistik, lebih tepatnya dalam bidang komunikasi-jurnalistik. Lebih dalam, penelitian ini dapat menjadi materi pembelajaran dan pembahasan mengenai isu kesetaraan gender serta kesejahteraan dalam profesi jurnalis bagi calon jurnalis muda kedepannya.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi media massa. Agar media massa yang ada di Indonesia dapat lebih memerhatikan masalah kesejahteraan bagi jurnalis perempuan di lingkup pekerja media. Serta menjadi perspektif tambahan kepada para Jurnalis perempuan dan pembaca lainnya mengenai bagaimana media menerapkan di Indonesia telah memberi jaminan kesejahteraan bagi jurnalis perempuan. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi media dalam membahas isu kesejahteraan bagi pekerjanya terutama Jurnalis perempuan sehingga dapat lebih memerhatikan keberadaan perempuan dalam pekerjaan jurnalistik.

c. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai pekerjaan Jurnalis perempuan yang bekerja di media asing maupun lokal di Indonesia. Serta dapat melihat bagaimana regulasi

dan jaminan kesejahteraan di media yang mempekerjakan jurnalis perempuan.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Akan adanya kesulitan mendapat informasi dari jurnalis perusahaan media yang bersangkutan.
2. Memerhatikan sifat sensitif atas pertanyaan yang diajukan, karena responden mungkin memberi jawaban yang tidak sesuai dengan pengalaman yang ada di lapangan.
3. Sulitnya mendapat keterbukaan informasi dari informan yang bersangkutan, karena informasi yang dicari tahu bersangkutan dengan nama perusahaan dari jurnalis yang bekerja.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA